

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA
PEMERINTAH
(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan)**

SKRIPSI



Nama : Siti Yulina

NIM : 222017179

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2021

SKRIPSI

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA
PEMERINTAH**

**(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan)**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Siti Yulina
Nim : 222017179**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Yulina
NIM : 222017179
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi
Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi
Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada
Pemerintah

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Starata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan,


Siti Yulina


Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

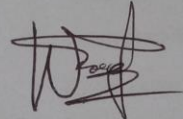
Judul : Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi
Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi
Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada
Pemerintah
Nama : Siti Yulina
NIM : 222017179
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Pembimbing I.

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Agustus 2021
Pembimbing II.



Dr. Drs. Sunardi, SE., M.Si
NIDN/NBM: 0206046303/784021



Welly, SE, M.Si
NIDN/NBM: 0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E.Ak., M.Si.CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Orang hebat adalah orang yang jatuh bangun dan jatuh bangun lagi, tanpa kehilangan antusiasme.*

- *Pilihan-pilihan anda adalah cerminan siapa diri anda*

Meski ada keterbatasan, tapi selalu ada kesempatan untuk memilih yang terbaik.

- *Hidup bukan untuk mati tapi untuk hidup setelah mati, marilah kita mencari bekal untuk hidup setelah mati.*

Terucap pada Mu Allah SWT.

Ku persembahkan untuk;

- *Papa dan mamaku Tercinta*
- *Kakaku Tersayang*
- *Adik-Adikku Tersayang*
- *Kekasihku tercinta*
- *Dosen Pembimbing*
- *Dosen-Dosen Feb UMP*
- *Sahabat-Sahabat Terbaikku*
- *Almamaterku*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarokatuh

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan berjudul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah”** yang peneliti dapat selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada kedua orang tuaku mamaku tercinta Nuraini dan Papaku tercinta Yanto beserta kakakku Ahmad Zainuri dan Adik-adikku tercinta Maulana dan Seftiana beserta kekasihku Tommi Kurniawan atas do'a dan kasih sayang yang berlimpah, semangat dan selalu memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Drs. Sunardi, S.E., M.Si dan Ibu Welly, S.E., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, dan tak lupa juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor beserta staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom, S.E.,M.Si selaku Dekan beserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri Sirajuddin., S.E., Ak., M.Si., CA dan ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Kepada keluargaku tersayang terima kasih telah memberikan dorongan semangat dan doa'a yang tulus.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pegawai di Kantor BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Sahabatku Fira Ari Kusmira dan Mita Tia Ayu Lestari

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 09 September 2021

Peneliti.



Siti Yulina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENYERTAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	16
1. Pengertian APBD	16
2. Pengertian Perencanaan Anggaran	18
3. Indikator Perencanaan Anggaran.....	19
4. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	21
5. Indikator Komitmen Organisasi	22
6. Indikator Penyerapan Anggaran Belanja.....	24
B. Penelitian Sebelumnya.....	24
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Hipotesis	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Operasionalisasi Variabel	31
D. Populasi dan Sampel.....	32
E. Data yang Diperlukan	34
F. Metode Pengumpulan Data.....	35
G. Analisis Data dan Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	44
1. Sejarah Tentang Provinsi Sumatera Selatan.....	44
2. Sejarah Tentang BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	48
3. Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	51
4. Visi dan Misi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	52
a. Visi	52
b. Misi	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	70
2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	73
3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	76

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	80
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Tabel I.2	Realisasi Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Selatan.....	11
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	27
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	31
Tabel III.2	Daftar Populasi Pemerintah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	33
Tabel IV.1	Hasil Statistik Deskriptif.....	55
Tabel IV. 2	Hasil Uji Validitas	57
Tabel IV.6	Hasil Uji Reliabilitas	58
Tabel IV.7	Hasil Uji Normalitas	60
Tabel IV.9	Hasil Uji Multikolinieritas	62
Tabel IV.10	Hasil Uji Heterokseditas	64
Tabel IV.11	Hasil Persamaan Regresi.....	65
Tabel IV.12	Hasil Uji Simultan	67
Tabel IV.13	Hasil Uji Determinasi	68
Tabel IV.14	Hasil Uji Parsial.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.3	Grafik Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	13
Gambar IV. 1	Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	51
Gambar IV.8	Grafik Normal P-Plot.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Penulis

Lampiran 2 : Fotocopy Sertifikat AIK

Lampiran 3 : Fotocopy Surat Keterangan Riset

Lampiran 4 : Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lmpiran 5 : Fotocopy Bebas Plagiat

ABSTRAK**Siti Yulina / 222017179/ 2021/ Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah**

Tujuan untuk mengetahui Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Sebagai sampel penelitian ini adalah 49 pegawai di (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Perencanaan Anggaran berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Penyerapan Anggaran Belanja di (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. (2) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Penyerapan Anggaran Belanja di (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. (3) Komitmen Organisasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Penyerapan Anggaran Belanja di (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. (4) Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Belanja di (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

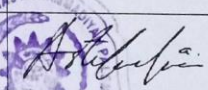
Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Kompetensi, Komitmen, Penyerapan

ABSTRACT

Siti Yulina / 222017179/2021/ The Influence of Budget Planning, Human Resource Competence and Organizational Commitment to the Absorption of Regional Budgets in the Government

This study aimed to determine the effect of budget planning, human resource competence, and organizational commitment on the absorption of regional budgets in the government. This research is quantitative. The analysis used is multiple regression analysis. As the sample of this study were 49 employees in Regional Financial and Asset Management Agency South Sumatra Province. The results of this study state that (1) Budget Planning has a significant and positive effect on Budget Absorption in Regional Financial and Asset Management Agency South Sumatra Province. (2) Competence of Human Resources has a significant and positive effect on the Absorption of the Expenditure Budget in Regional Financial and Asset Management Agency South Sumatra Province. (3) Organizational Commitment has a significant and positive effect on Budget Absorption in Regional Financial and Asset Management Agency South Sumatra Province. (4) Budget Planning, Human Resource Competence, and Organizational Commitment simultaneously affect the Absorption of Budget Expenditures in Regional Financial and Asset Management Agency South Sumatra Province.

Keywords: Budget Planning, Competence, Commitment, Absorption

NO	NAMA	NIM	RANGAN
A109	Siti Yulina	222017179	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Salah satu tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke empat adalah memajukan kesejahteraan umum. Sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah pusat melakukan kebijakan desentralisasi dimana sebagian wewenangnya diserahkan kepada daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah memerlukan pendanaan memadai yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui Kas Negara dan Kas Daerah. Adanya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 menuntut kebijakan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada dalam wilayahnya, salah satunya adalah desentralisasi fiskal dimana tiap daerah diberi keleluasaan untuk mengelola keuangannya masing-masing. Desentralisasi fiskal pada dasarnya dapat mendorong peningkatan efisiensi belanja karena Pemerintah daerah lebih tahu kebutuhan masyarakatnya dari pada Pemerintah Pusat.

Komitmen pemerintah pusat dalam menerapkan desentralisasi fiskal makin nampak, hal ini terlihat dari peningkatan dana transfer setiap tahun. Namun pada saat pemerintah pusat terus berupaya untuk menjalankan komitmen dalam menerapkan desentralisasi fiskal dengan meningkatkan dana transfer ke daerah disetiap tahun anggaran, sebuah fenomena yang menarik justru terjadi di daerah-daerah, yaitu minimnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sistem penganggaran berbasis kinerja minimnya penyerapan anggaran memang tidak dapat dijadikan sebagai indikator buruknya kinerja birokrasi, akan tetapi kondisi perekonomian saat ini masih sangat bergantung pada konsumsi pemerintah, sehingga belanja pemerintah turut menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di daerah yang pada akhirnya mendorong terciptanya *multiplier effect* bagi daerah tersebut sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Selain itu, adanya dana yang tidak terserap hingga diakhir tahun anggaran menunjukkan adanya inkonsistensi antara perencanaan anggaran dan realisasi. Meskipun dana tersebut dapat dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, tetapi berdasarkan konsep *time value of money* dana tersebut berpotensi berkurang atau bahkan kehilangan manfaat belanja yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Penerapan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 menuntut kebijakan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menciptakan perubahan yang mendasar terhadap tata pelaksanaan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, serta menjadi langkah awal kemunculan Otonomi Daerah. Otonomi daerah mengamankan pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dan keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah pusat guna mengalokasikan sumber-sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda. Otonomi daerah merupakan

suatu kebebasan atau kewenangan dalam mengambil suatu keputusan politik maupun administratif sesuai dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penerapan undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberi harapan agar pemerintah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antara pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan dalam persaingan global. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu mempercepat laju kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Adanya desentralisasi memungkinkan penyesuaian pelayanan publik dengan permintaan lokal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi, dan menciptakan persaingan antar yurisdiksi.

Rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom tersebut, maka salah satu aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah adalah masalah anggaran dan pengelolaannya. Secara umum anggaran dapat didefinisikan sebagai rencana terperinci dari pendapatan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya-sumber daya lainnya pada satu periode tertentu.

Mardiasmo (2018:74) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa segala bentuk Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi.

Tahun anggaran APBD juga mengikuti tahun anggaran APBN yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. Total pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Belanja adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Permendagri nomor 21 tahun 2011, mendefinisikan belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Oleh karena itu serapan belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Meskipun demikian bukan berarti capaian penyerapan anggaran belanja diperbolehkan lebih rendah dari yang telah direncanakan.

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa : “Penyerapan anggaran merupakan rencana sistematis yang berisikan tentang keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang berlaku dalam waktu tertentu untuk selanjutnya diwujudkan secara nyata”. Secara garis besar penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu. Persoalan penyerapan anggaran melebihi pagu anggaran masih kerap terjadi di beberapa kementerian maupun lembaga dan satuan kerja pemerintah.

Zarianah (2015) mengatakan bahwa: Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan, dengan kompetensi berupa pengalaman dan motivasi yang dimiliki menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor kunci dalam pengelolaan anggaran.

Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu. Selain sumber daya manusia yang kompeten, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga memiliki pengaruh terhadap Kualitas

Laporan Keuangan. Masalah kompetensi sumber daya manusia menjadi tantangan setiap pegawai bidang keuangan Pemerintah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Fenomena menurut Eman Satria, SE.MM.,Ak.,CA sebagai Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S3)	-
2	Sarjana (S2)	38
3	Sarjana (S1)	48
4	Diploma IV	1
5	Diploma III/Sarjana Muda	4
6	SMA/SMK/Sederajat	3
	Total	94

Sumber : BPKAD 2021

Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagaimana besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) 48 orang (51%), yang berpendidikan Sarjana (S2) 38 orang (40%), Diploma IV 1 orang (1%), Diploma III/Sarjana Muda 4 orang (4%) dan berpendidikan SMA/SMK/Sederajat 3 orang (4%). Dari komposisi tersebut diatas disimpulkan bahwa pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Pendidikannya Sarjana/Pascasarjana sehingga potensi kualitas pegawai dapat dikatakan tinggi.

Robbins (2015) bahwa komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai bagaimana tingkat seorang anggota mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan tujuan organisasi, serta harapan organisasi untuk bertahan dalam organisasi.

Komitmen organisasi merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan seseorang untuk bertahan sebagai

anggota organisasi. Komitmen organisasi merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi dan bersedia serta berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Fenomena menurut Eman Satria, SE.MM.,Ak.,CA sebagai Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Mengatakan bahwa didalam instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan bahwa pegawai memiliki hak sendiri untuk berkarir dalam organisasi tersebut.

Cut (2015) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian baik secara simultan maupun parsial mendukung hipotesis bahwa kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran SKPD pada Pemerintah Kota Banda Aceh, baik secara simultan maupun secara persial.

Dadan (2017) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Terdapat pengaruh positif dan signifikan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Zarinah (2016) Herryanto (2012). Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Fitriany (2015) dan Zarinah (2016).

Kadek (2017) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (1) variabel perencanaan anggaran (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, (2) variabel kuantitas sumber daya manusia (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, dan (3) variabel komitmen organisasi (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Nanang (2020) *Antecedent Variable* Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pengadaan barang dan jasa, Komitmen manajemen, Lingkungan birokrasi, Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Rika (2020) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 28,3% terhadap penyerapan anggaran belanja. Namun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan

pengadaan barang dan jasa secara persial berpengaruh positif dan signifikan sebesar 19,7% terhadap penyerapan anggaran belanja.

Fenomena mengenai penyerapan anggaran yang sudah maksimal dan sudah proporsional merupakan terjadi pada setiap tahun berjalan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas belanja. Anggaran belanja harus digunakan secara berkualitas, efektif, dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus digunakan untuk program dan kegiatan yang benar-benar produktif dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Fenomena Perencanaan Penyerapan anggaran yaitu dalam perencanaan dan penganggaran sektor publik isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran seperti partisipasi, kesenjangan anggaran, loyalitas kinerja dan dimensi lainnya, telah menarik banyak peneliti dan ilmuwan untuk melakukan diskusi secara mendalam, salah satunya terkait dengan perilaku aparat. Perilaku aparatur turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pemerintah. Anggaran mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku manusia, sebaliknya perilaku manusia memiliki dalam yang luas dalam pengelola anggaran dan alokasi anggaran. Anggaran memberikan informasi kepada manusia mengenai apa yang diharapkan dan kapan harus dilaksanakan. Anggaran memberikan batasan mengenai apa yang boleh dibeli dan seberapa banyak yang boleh dibeli. Manusia juga berharap dari jumlah anggaran yang akan dan yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan akan datang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten Arivai No.3 Palembang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan yang menjadi wewenang daerah di kota Palembang. Visi misi BPKAD yaitu terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung Sumsel Sejahtera lebih maju dan berdaya saing internasional antara lain menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamatan aset daerah, dan menciptakan pelayanan prima keuangan dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentu membuat tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sendiri menjadi sangat strategis. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari enam bagian bidang dan dua belas Sub Bagian Pengelolaan dan Aset Daerah yang bertugas yaitu Kepala Badan, Bidang Sekretaris, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Milik Daerah.

Tabel I.2
Realisasi Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2019

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2016	Belanja operasi	3.650.152.269.188,7	3.486.550.395.731,7	95,52
	Belanja Modal	846.142.303.821,20	609.740.926.745,28	71,82
	Belanja tidak terduga	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
	Total Belanja Daerah	4.496.474.573.009,91	4.094.471.321.477,03	91,06
2017	Belanja operasi	4.631.655.652.295,00	4.410.377.592.244,00	95,22

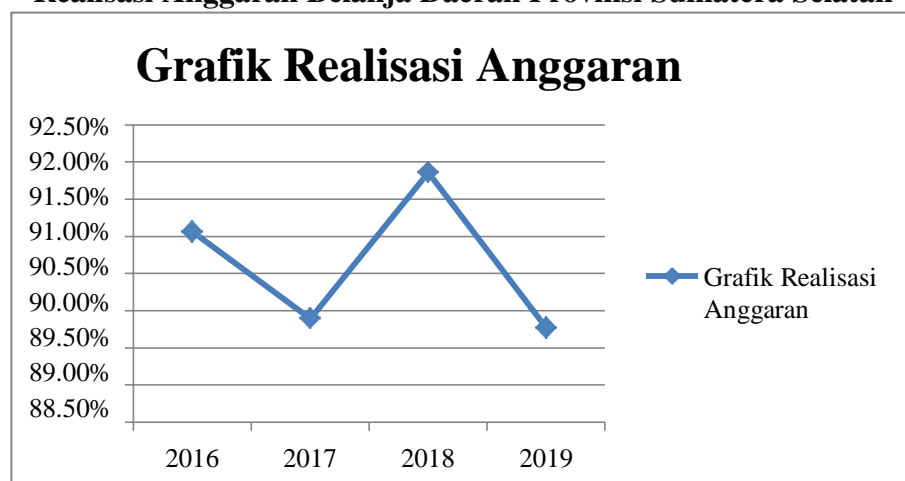
	Belanja Modal	1.806.367.818.574,00	1.377.382.678.423,59	76,22
	Belanja tidak terduga	1.500.000.000,00	5.788.552.526.667,59	52,82
	Total Belanja Daerah	6.439.523.470.869,00	5.788.552.526.667,59	89,89
2018	Belanja operasi	5.730.234.643.508,00	5.226.350.947.402,94	91,21
	Belanja Modal	1.690.535.413.549,95	537.275.105.768,15	90,93
	Belanja tidak terduga	6.000.000.000,00	134.480.200,00	2,24
	Total Belanja Daerah	7.426.770.057,95	6.763.760.533.371,09	91,86
2019	Belanja operasi	6.140.097.371.311,47	5.494.913.456.747,11	89,49
	Belanja Modal	1.820.168.210.865,27	1.652.799.376.582,26	90,80
	Belanja tidak terduga	6.000.000.000,00	4.071.125.143,00	67,85
	Total Belanja Daerah	7.966.265.582.176	7.151.783.494.472	89,77

Sumber: BPKAD 2021

Berdasarkan Tabel I.2 terjadinya penyerapan anggaran belanja modal yang tidak mencapai standar kondisi keuangan pada Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2020. Dapat dilihat dari rata-rata realisasi belanja modal pada tahun 2016-2019 sebesar 4,61% dan dapat dilihat menurut standar kondisi keuangan dilihat dari rata-rata realisasi belanja modal 95,5% maka dapat dikatakan hasil belanja modal 4,61 kurang dari 95,5% maka dikatakan tidak efisien. Karena Pemerintah ada ketakutan untuk menggunakan lagi modal yang lebih tinggi, karena penyerapan anggaran berakibat hilangnya

manfaat belanja karena dana dialokasikan ternyata tidak semuanya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah, contohnya seperti pembangunan jalan apabila jalan yang masih bagus lalu diperbaiki kembali maka dikatakan tidak ada manfaat bagi masyarakat. Dan rata-rata realisasi anggaran belanja tidak terduga pada tahun 2016-2019 sebesar 1,9% dan dapat dilihat menurut standar kondisi keuangan dilihat dari rata-rata realisasi belanja tidak terduga 84,6% maka dapat dikatakan hasil belanja tidak terduga 1,9% kurang dari 84,6% maka dikatakan tidak efisien. Pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga adalah belanja penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya.

Grafik I.1
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Penulis 2021

Pada tahun 2016 dimana berdasarkan grafik realisasi anggaran belanja tersebut mengalami kenaikan, pada tahun 2017 mengalami penurunan, 2018 mengalami kenaikan dan tahun 2019 mengalami penurunan. Pengelolaan

keuangan anggaran sudah optimal, karena terdapat aktivitas yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini bagaimanakah Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut di atas, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapatbermanfaat :

1. Bagi Penulis

Sebagai masukan Penelitian ini dapat membantu menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis dalam Perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah.

2. Bagi Badan pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD)

diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi pemerintah daerah dalam mencapai tingkatan penyerapan anggaran pemerintah.

3. Bagi Almamater

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya, serta dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan yang menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Kurniawan. 2014. *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)*. Alfabeta. Bandung.
- Anggie Rumondang Berlian Sianipar, dkk. 2014. *Hubungan Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Dengan Intensi Turnover Pada Karyawan Bidang Produksi CV.X*.
- Abdu Halim. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Abdul Latief, Syardiansah, Muhammad Safwan. 2019. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan*.
- Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP). 2011. *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Paris Review Tahun III No. 6. Desember 2011.
- Cut Malahayati, Islahuddin, Hasan Basri. 2015. *Pengaruh Kapasitas SDM, Perencanaan Anggaran & Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemkot Banda Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Dadan Ramdhani, Indi Zaenur Anisa. 2017. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Profinsi Banten*.
- Diah. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Palembang: Noer Fikri
- Kadek Mia Ranisa Putri, Gede Adi Yuniarta, Made Aristia Prayudi. 2017. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- M. Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta
- Moeheriono . 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Rajawali Pers. Jakarta
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Noviwijaya, A & A. Rohman (2013). *Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja*

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang
1) *Diponegoro Journal of Accounting*. 2 (3).

Nilam sari. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Interen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal: Yosefrinaldi.JOM Fekon Vol. 3 No.1.

Nanang Agus Suyono. 2020. Antecedent Variabele Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2020. Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Robbins, S.p., & Judge, T. A (2015). *Perilaku Organisasi* (Edisi 16). Salemba Empat.

Romie Priyastama, 2017. *SPSS Pengelolaan Data dan Analisis Data*. Yogyakarta: Star Up.

Ria Mardiana Yusuf, Darman Syarif. (2017). *Komitmen Organisasi*. Makasar : Nas Media Pustaka.

Rika Septi Rahmawati. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi.

Sofyan Syafari Harahap, 2011. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali.

Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman. 2017. *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian: Dilengkapi Aplikasi Program SPSS*. Bandung: Pustaka Setia..

Shaleh, Mahadin (2018), *Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai*, Makassar : Aksara Timur.

Slamet Riatno dan Aglis Andhita Hatmawan. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. CV Budi Utama, yogjakarta.

Taufiqurokhman, 2008. *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17. 2003. *Tentang Keuangan Negara*.

Undang-Undang No. 32. 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.

- V. Wiratna Sujarweni. 2020, metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Widodo, 2013. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Jurnal. Universitas Tanri.
- Windhu Putra. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. PT Raja Grafindo: Depok
- Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Zarinah, Monik. 2015. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran SKPD Kabupaten Aceh Utara. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.